



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAESARAH
2. Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. NHK : 516889

**II. DATA HARTA**

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.500.000.000
1. Tanah Seluas 883 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
  2. Tanah Seluas 2.822 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
  3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
  4. Tanah Seluas 8.040 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
  5. Tanah dan Bangunan Seluas 3.000 m2/400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.000.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 218.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
  2. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
  3. MOTOR, HONDA SPMR2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 225.000.000
- D. SURAT BERHARGA** Rp. ---
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 49.342.367



F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	5.042.342.367
III. HUTANG	Rp.	335.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.707.342.367

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.